KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR
NOMOR: 7a /KPN/OT1.6/I/2024

TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 12 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,

I Nyoman Wiguna

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : 7a /KPN/OT1.6/I/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN 2024

| NO | JABATAN | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | Pembina | I Nyoman Wiguna, S.H., M.H |
| 2 | Penanggung Jawab | Agus Akhyudi, S.H., M.H |
| 3 | Pengarah Bidang Yudisial | Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H. M.H. |
| 4 | Pengarah Bidang Non Yudisial | I Wayan Sudana, S.E. |
| 5 | Pelaksana | Siti Chomsiyah, S.H.<br>Anak Agung Gede Oka Astawa, S.H.<br>I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H.<br>Lien Herlinawati, S.H., M.H.<br>I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H., M.H.<br>Ni Luh Ekarini, S.E.<br>I Nyoman Edianta, S.E.<br>Ade Marta Olivia, S.E. |
| 6 | Tim Pengolah Data | Ni Putu Pradnyanni Mahantari, S.H<br>Kadek Devi Saraswastuti, S.H<br>Ni Putu Ikayana Sugma Dewi, S.T<br>I Made Suaraprantara. |
| 7 | Sekretariat | I Nengah Agus Elec Artha, S.T., S.H.<br>Koko Pradityo, S.Kom.<br>Agung Andesta Pratama, S.E. |

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,

I Nyoman Wiguna

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

# SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR
NOMOR: 15 /KPN/OT1.6/I/2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Negeri Denpasar perlu menyusun Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2020-2024 (terlampir) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang berisi:
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Denpasar.

KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Negeri Denpasar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Denpasar periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024;
2. Acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing kepaniteraan/bagian pada Pengadilan Negeri Denpasar periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,

I Nyoman Wiguna

## MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
## PENGADILAN NEGERI DENPASAR

**Visi** : **Terwujudnya Pengadilan Negeri Denpasar Yang Agung**

**Misi** :
1. **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;**
2. **Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;**
3. **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;**
4. **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.**

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran | | Target | | | | | Strategi | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uraian | Indikator Kinerja | % | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | | Anggaran (dalam juta rupiah) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
| 1. | Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan; | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 92 | Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 1200 | Perkara | 818,74 | 816,98 | 849,82 | 805,06 | 805,06 |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | 10 | | b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | 10 | 10 | 10 | | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | | Perkara | | | | | |

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran | | Target | | | | | Strategi | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uraian | Indikator Kinerja | % | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 Jumlah | Target 2024 Satuan | Anggaran (dalam ribuan rupiah) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | Persentase perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding | 90 | | c. Persentase perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | Persentase perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding | | Perkara | | | | | |
| | | Persentase perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding | 90 | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum Kasasi | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | Persentase perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding | | Perkara | | | | | |
| | | Persentase perk'ara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan *Diversi* | 10 | | e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan *Diversi* | | Perkara | | | | | |
| | | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap | 85 | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | | | Index responden pencari keadilan yang puas | | Perkara | | | | | |

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran | | Target | | | | | Strategi | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Target 2024 | | Anggaran (dalam jutaan rupiah) | | | | |
| | Uraian | Indikator Kinerja | (%) | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Jumlah | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
| | | layanan peradilan | | | pelayanan peradilan | | | | | | | | terhadap layanan peradil-an | | | | | | | |
| | | Persentase Salinan Putusan yang dikirm kepada para pihak/ pengadilan pengaju Tepat Waktu | 92 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Salinan Putusan yang dikirm kepada para pihak/ pengadilan pengaju Tepat Waktu | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Pening-katan Manaje-men Peradil-an Umum | Persentase Salinan Putusan yang dikirm kepada para pihak/ pengadilan pengaju Tepat Waktu | 1200 | Perka-ra | 818,74 | 816,98 | 849,82 | 805,06 | 805,06 |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 2 | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | | Perka-ra | | | | | |
| | | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100 | Meningkat-nya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan | 48 | Orang | | | | | |

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran | | Target | | | | | Strategi | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Tahun | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 Jumlah | Target 2024 Satuan | Anggaran (dalam jutaan rupiah) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
| | | | | | | | | | | | | | bantuan hukum (Posbakum) | | | | | | | |
| | | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklan-juti (dieksekusi) | 80 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Program Penegak-an dan Pelayanan Hukum | Pening-katan Manaje-men Peradil-an Umum | Persen-tase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak-lanjuti (dieksek usi) | 1200 | Perka-ra | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. | Persentase Layanan Umum dalam peningkatan kompetensi ASN | 85 | Terwujudnya pelaksanaan dukungan manajemen guna peningkatan pelayanan pengadilan | Persentase Layanan Umum dalam peningkatan kompetensi ASN | - | - | 85 | 85 | 85 | | | Persen-tase Layanan Umum dalam peningk atan kompe-tensi ASN | 85 | Persen | | | | | |
| | | Persentase Layanan Per-kantoran pendukung kinerja: - Gaji dan tunjangan Operasi-onal pemeliha-raan kantor | 90 | | Persentase Layanan Per-kantoran pendukung kinerja: - Gaji dan tunjangan Operasi-onal pemeliha-raan kantor | - | - | 90 | 90 | 90 | | | Persenta se Layanan Per-kantoran penduku ng kinerja: -Gaji dan tunjan gan -Opera | 90 | Persen | | | | | |

| No. | Tujuan | | Target Jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran | | Target | | | | | Strategi | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uraian | Indikator Kinerja | % | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | | Anggaran (dalam ribuan rupiah) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
| | | | | | | | | | | | | | sional pemelihaaan kantor | | | | | | | | |
| | | Persentase tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | Persentase tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal | - | - | 90 | 90 | 90 | | | Persentase tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | | | | | |